

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH,  
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS LAPORAN  
KEUANGAN DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
(Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kampar Tahun 2017)

Oleh :

**Rahmi Awalia**

**Pembimbing : Restu Agusti dan Meilda Wiguna**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

*Email : [rahmi3005@yahoo.com](mailto:rahmi3005@yahoo.com)*

*Effect Of Application Of Regional Financial Accounting System, Presentation Of  
Financial Statements, Accessibility Report Finance And Control Activities  
Onaccountability Of Regional Financial Management  
(Empirical Study On Kampar Regency  
SKPD Year 2017)*

**ABSTRACT**

*This research was conducted on Kampar district government. This research is included in quantitative research. The type of data used in this study is primary data is data derived from the next source in data collection techniques, sampling is done by Purposive Sampling method of sampling technique with certain considerations (Sugiyono, 2012: 116 with respondents as many as 116 employees who work in SKPD Kabupaten Kampar data was analyzed using multiple linear regression analysis with SPSS Version 21. This study aims to determine the effect of Regional Financial Accounting System, Presentation of Regional Financial Statements, Accessibility of Financial Statements and Control Activities to Accountability of Regional Financial Management. The main issues that will be explained by the researcher are as follows: To see how big influence and signifikan between dependent variable with independent variable. The results of this study indicate that the Regional Financial Accounting System has an effect on the Accountability of Regional Financial Management, Presentation of Regional Financial Report has an effect on to Accountability of Regional Financial Management, Accessibility of Financial Statement has an effect on to Accountability of Regional Financial Management and Control Activity Influence to Accountability of Regional Financial Management with significance value 0,008 , 0.003, 0.012 dean 0.000 Contribution of variable variable of Regional Financial Accounting System, Presentation of Regional Financial Report, Accessibility of Financial Statement and Control Activity can explain variable of Accountability of Regional Financial Management at Regency Government of Kampar equal to 78,6%. While the remaining 21.4% is influenced by the variables not observed in this research model.*

**Keywords:** *Accountability, Regional Financial Accounting System, Financial Statement, Accessibility, and Control Activities*

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat (Mardiasmo, 2009).

Dalam pengelolaan keuangan harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.13 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 dan diperbaharui lagi dengan Permendagri No. 32 tahun 2011 kemudian Permendagri No. 21 tahun 2011 yaitu perubahan kedua Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai pertanggungjawaban dan pengawasan penggunaan anggaran daerah. Pengelolaan keuangan daerah mencakup aktivitas; perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi (PP. No. 58 tahun 2005).

Menurut Mardiasmo (2009: 65) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta peraturan-peraturan pendukungnya (Sari, 2012).

Pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006).

Hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tiga tahun terakhir (2013-2015) masih menunjukkan banyaknya kelemahan, hal ini terlihat pada kualitas opini LKPD yang belum baik. Hal ini disesalkan karena

buruknya akuntabilitas keuangan daerah tersebut meningkatkan peluang kebocoran dan menghambat kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Menurut Wiyana Anim dan Anna Sutrisna (2014) Isu rendahnya akuntabilitas semakin dipertegas dengan adanya laporan audit yang disampaikan oleh BPK yang menyatakan bahwa mayoritas laporan keuangan pemerintah daerah diseluruh Indonesia masih mendapatkan penilaian buruk dan masih sedikitnya daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dibawah 25%.

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah daerah (Permendagri No. 64 tahun 2013).

Berlakunya PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menjadi basis akrual penuh dalam transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket undang-undang keuangan Negara juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban yang bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyajian laporan keuangan daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah kemudian direvisi menjadi PP No 71 tahun 2010 yaitu penyajian laporan keuangan terdiri atas Laporan realisasi anggaran, Laporan Perubahan Atas Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2009).

Selain itu juga diperlukan aktivitas pengendalian, menurut Mardiasmo (2009) bahwa aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian seharusnya efisien dan efektif, menyajikan kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain untuk mencapai tujuan pengendalian itu sendiri.

### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Apakah

penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? 2. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? 3. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? 4. Apakah aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap upaya mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap upaya mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap upaya mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh aktivitas pengendalian terhadap upaya mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Adapun menurut Peraturan Pemerintah, Peraturan No 24 Tahun 2005 tentang SAP, “Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan

pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik. Publik mempunyai hak untuk mengetahui laporan keuangan pemerintah. Adanya tingkat kepuasan yang berbeda-beda untuk tiap pengguna informasi keuangan, menyebabkan kebutuhan informasi yang berbeda pula yang dapat menyebabkan timbulnya konflik kepentingan. Namun kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah dapat diringkas sebagai berikut (Mardiasmo, 2009):.

#### **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Sistem akuntansi keuangan daerah meliputi serangkaian proses ataupun prosedur, baik manual maupun komputerisasi yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah.

Ada beberapa macam sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu (Halim, 2007; 41): 1. *Single Entry*: Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat

berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. 2. *Double Entry*: Sistem pencatatan *double entry* juga sering disebut tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini ada sisi debet dan kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. 3. *Triple Entry*: Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Oleh karena itu, sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan, sub bagian pembukuan (bagian keuangan) pemerintah juga mencatat transaksi tersebut akan berefek pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisi anggaran.

### **Penyajian Laporan Keuangan Daerah**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 01 alinea 10 Tentang Penyajian Laporan Keuangan, tujuan dari pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Dalam PP No. 71 tahun 2010, menyatakan bahwa laporan keuangan harus disajikan oleh kepala daerah meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Aksesibilitas Laporan Keuangan.**

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2009).

Menurut Mardiasmo (2009), laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability dan stewardship*).

Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio,

stasiun televisi, dan *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Mulyana, 2006).

Menurut Yani (2009), pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas termasuk informasi keuangan daerah. Dengan kemajuan teknologi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan memberdayakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

### **Aktivitas Pengendalian**

Pengendalian (*controlling*) didefinisikan sebagai suatu proses memantau kinerja dan mengambil tindakan untuk menyakinkan bahwa suatu hasil tercapai (Schermerhorn 2002). Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa pengendalian merupakan suatu aktivitas yang berupa "proses memantau". Terdapat obyek yang dipantau yaitu "kinerja". Hasil pemantauan digunakan untuk melakukan tindakan korektif agar hasil yang diharapkan tercapai. Sebagai suatu proses, maka proses pengendalian sedikitnya memiliki empat langkah yaitu: 1. Penetapan tujuan dan standar 2. Mengukur

kinerja aktual 3. Membandingkan hasil pengukuran dengan tujuan atau standar 4. Mengambil tindakan korektif yang dipandang perlu (Schermerhorn 2002).

Pengendalian sedikitnya memiliki tiga tipe utama yaitu: *feedforward controls*, *concurrent controls* dan *feedback controls* (Schermerhorn, 2002). *Feedforward controls* berguna untuk menjamin bahwa arah yang benar telah ditetapkan dan input sumber daya yang tepat telah tersedia. *Concurrent controls* berguna untuk menjamin bahwa aktivitas yang benar telah dilakukan. *Feedback control* berguna untuk menjamin bahwa hasil yang dicapai telah memenuhi standar yang telah ditetapkan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Pengendalian bisa dilakukan dengan memberikan motivasi kepada individu atau kelompok secara mandiri disiplin mematuhi ketentuan yang ada. Pengendalian juga bisa dilakukan dengan melakukan supervisi atau menggunakan sistem administrasi formal. Pengendalian dilaksanakan dengan berpedoman kepada sistem pengendalian intern pemerintah, dimana fungsi sistem pengendalian intern adalah sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan kegiatan - kegiatan suatu organisasi dengan

mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif (Santoso, 2016).

### **Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian**

#### **Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Akuntabilitas dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). keakurasian angka-angka yang tertera dilaporan keuangan dihasilkan oleh sistem akuntansi yang memadai untuk akuntabilitas pelaporan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat maupun pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Agar terwujudnya suatu akuntabilitas keuangan daerah, maka keberadaan sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan karena mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, adil, efektif, dan efisien sehingga tercipta pertanggungjawaban atas pengelolaan tersebut secara akuntabel dan transparan.

H1: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

#### **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting

untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010).

Penyajian laporan keuangan ini diharapkan akan mengurangi kesalahan kecurangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sehingga melalui penyajian laporan keuangan yang baik, akan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah yang diharapkan.

H2: Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

#### **Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami Sukhemi (2013).

Pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat secara

baik dan terbuka dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat sehingga masyarakat percaya kepada pemerintah. Berarti dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi masyarakat akan menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

H<sub>3</sub> : Aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **Pengaruh Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa organisasi telah mematuhi semua undang-undang dan standar etika; mematuhi misi organisasi, etika, personil dan kebijakan akuntansi, melindungi hak-hak anggota, menyusun dan mengajukan laporan keuangan tahunannya sesuai peraturan dan membuat laporan tersedia untuk semua anggota dewan dan setiap anggota masyarakat yang memintanya. Pengembangan dan pemeliharaan pengendalian internal organisasi akan membantu untuk memastikan akuntabilitas.

H<sub>4</sub> : Aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah kabupaten Kampar yang berjumlah 29 SKPD. Sampel penelitian adalah kepala sub bagian keuangan, Bendahara dan 2 Pegawai bagian keuangan yang menjabat minimal 1 tahun. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Total sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 116 responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Sumber data penelitian ini adalah skor total yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang diantarkan langsung kepada staf/pegawai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Kampar.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei yaitu metode pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Masing-masing SKPD diberikan kuesioner dengan jangka waktu pengembalian 1 bulan sejak kuesioner diterima oleh responden.

Setiap responden diminta untuk memilih salah satu jawaban dalam kuesioner yang sesuai dengan persepsinya diantara alternatif jawaban yang telah disediakan. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dibuat menggunakan skala likert 1 sampai dengan 5 untuk mendapatkan rentang jawaban sangat setuju sampai dengan jawaban sangat tidak setuju dengan memberi tanda silang (×) pada kolom yang dipilih.

### **Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya**

Variabel yang digunakan sebagai variabel dependen adalah Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

Karakteristik Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diadopsi dari penelitian Aliyah dan Nahar (2012) diukur dengan lima indikator yaitu : Akuntabilitas kejujuran, Akuntabilitas hukum, Akuntabilitas proses, Akuntabilitas program dan Akuntabilitas kebijakan.

Variabel independen dalam penelitian adalah Sistem akuntansi keuangan daerah, Penyajian laporan keuangan daerah, Aksesibilitas laporan keuangan dan Aktivitas pengendalian.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronik dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah Daerah. Karakteristik Sistem akuntansi keuangan daerah diadopsi dari penelitian Widyaningsih (2011) diukur dengan tiga indikator yaitu : pencatatan, penggolongan dan pelaporan.

Penyajian Laporan Keuangan Daerah adalah penyajian laporan informasi keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan

dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No. 71 tahun 2010).

Karakteristik pemahaman atas penyajian laporan keuangan daerah diadopsi dari penelitian Sande (2013) diukur dengan empat indikator yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah.

Karakteristik aksesibilitas laporan keuangan diadopsi dari penelitian Sande (2013) diukur dengan tiga indikator yaitu: Terbuka di media massa, Mudah diakses, Ketersediaan informasi.

Aktivitas pengendalian sebagai komponen lain dari pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan baik.

Karakteristik Aktivitas pengendalian diadopsi dari penelitian Saputra (2014) diukur dengan enam indikator yaitu: Harus sesuai Prinsip Akuntansi; Perekrutan dan pengembangan SDM, Tugas Prosedur Dalam Pekerjaan, Kesesuaian, Pemisahan Tugas dan Independen.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Didalam penelitian ini kuesioner yang kembali sebanyak 96 kuesioner atau 83%. Sedangkan kuesioner yang tidak dapat diolah adalah 20 kuesioner atau 17%. Jadi total kuesioner yang dapat diolah dari jumlah keseluruhan kuesioner

disebarkan adalah 96 kuesioner atau 83%. Analisis data dilakukan terhadap 96 jawaban responden yang memenuhi kriteria untuk pengolahan data. Rata-rata jawaban responden untuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah adalah 26.708 dan standar deviasi 4.0129. Variabel penyajian laporan keuangan daerah memiliki nilai rata-rata 30.792 dan standar deviasi 5.1441. Variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki nilai rata-rata 11.969 dan standar deviasi 1.7257. Variabel aktivitas pengendalian memiliki nilai rata-rata 30.500 dan standar deviasi 4.5860. Untuk instrumen akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai rata-rata 38.365 dan standar deviasi 5.2055.

**Tabel 1**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	96	19.0	33.0	26.708	4.0129
Penyajian Laporan Keuangan Daerah	96	19.0	39.0	30.792	5.1441
Aksesibilitas Laporan Keuangan	96	9.0	15.0	11.969	1.7257
Aktivitas Pengendalian	96	16.0	39.0	30.500	4.5860
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	96	28.0	50.0	38.365	5.2055
Valid N (listwise)	96				

Sumber : Data Olahan, 2017

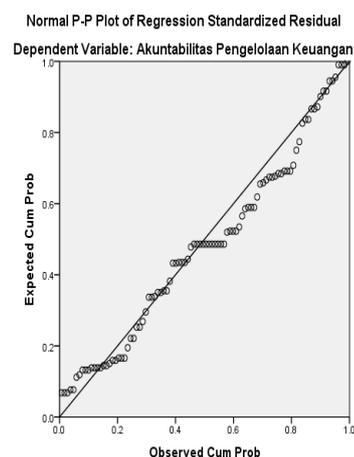
Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai  $r_{tabel}$  dengan  $r_{hitung}$ . Nilai  $r_{tabel}$  pada signifikansi 0,05 Sedangkan  $r_{hitung}$  diperoleh dengan persamaan  $df = N - 2 = 96 - 2 = 94 = 0.200$ .

Uji reliabilitas dilakukan dengan uji *cronbach alpha*. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika

memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,70 sebaliknya jika nilai alpha lebih rendah dari 0,70 maka nilai tersebut tidak reliabel (Ghozali, 2013:48 ). Dari hasil olahan data besarnya nilai *Cronbach Alpha* pada seluruh variabel besar dari 0,70 dan sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, hal ini berarti bahwa butir atau item pernyataan tersebut reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel memiliki distribusi normal.

**Gambar 1**



Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan gambar 1 diatas dapat dilihat penyebaran titik-titik di sekitar garis diagonal, dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

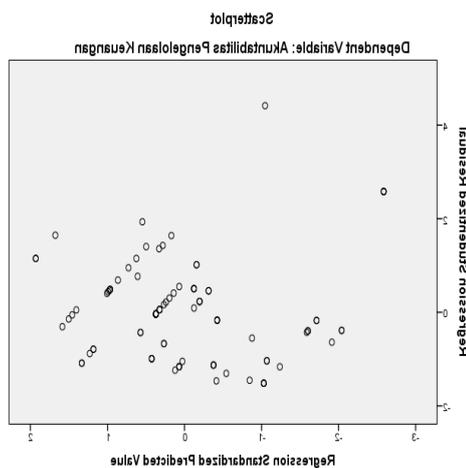
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*) atau tidak. Hasil perhitungan nilai tolerance bahwa semua nilai *tolerance* berada diatas

atau  $t > 0.10$  dan nilai VIF dibawah atau  $< 10$ .

Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari pengaruh multikolinieritas.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi kesamaan varian dari residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain.

**Gambar 2**



**Sumber : Data Olahan, 2017**

Berdasarkan Gambar.2 diatas dapat dilihat bahwa diagram pencar yang ada tidak membentuk pola atau acak, maka regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gangguan heterokedastisitas, atau dengan kata lain *Scatterplot* tidak membentuk pola tertentu (menyebar), Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi.

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya) dalam model regresi.

**Tabel 2**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.892 <sup>a</sup>	.795	.786	2.4094	1.808

**Sumber : Data Olahan, 2017**

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai Durbin Watson 1,808 lebih besar dari 1.779 dan lebih kecil dari 2.221. Artinya tidak terjadi masalah autokorelasi pada model yang dibangun.

Uji regresi ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 2.045 + 0.259X_1 + 0.221X_2 + 0.384X_3 + 0.590X_4 + e$$

Keterangan :

**Y** = Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

**a** = Konstanta

**X<sub>1</sub>** = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

**X<sub>2</sub>** = Penyajian Laporan Keuangan Daerah

**X<sub>3</sub>** = Aksesibilitas Laporan Keuangan

**X<sub>4</sub>** = Aktivitas Pengendalian

**b<sub>1234</sub>** = Koefisien Regresi

**e** = Kesalahan Residual (Error Turn)

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai  $a = 2.045$  menunjukkan bahwa jika Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Aktivitas Pengendalian 0 (nol) maka Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah bernilai 2.045.
- Nilai koefisien regresi variable Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ( $X_1$ ) adalah 0.259 dan

bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan satu satuan pada variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ( $X_1$ ) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka perubahan yang diperoleh pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) adalah sebesar 0.259 satuan dengan arah yang sama.

- c. Nilai koefisien regresi Penyajian Laporan Keuangan Daerah ( $X_2$ ) adalah 0.221 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan satu satuan pada Penyajian Laporan Keuangan Daerah ( $X_2$ ) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka perubahan yang diperoleh pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) adalah sebesar 0,221 satuan dengan arah yang sama.
- d. Nilai koefisien regresi Aksesibilitas Laporan Keuangan ( $X_3$ ) adalah 0.384 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan satu satuan pada Aksesibilitas Laporan Keuangan ( $X_3$ ) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka perubahan yang diperoleh pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y) adalah sebesar 0,384 satuan dengan arah yang sama.

Uji koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	.892 <sup>a</sup>	.795	.786	2.4094	1.808

Sumber : Data Olahan, 2017

Hasil perhitungan analisis regresi pada tabel 4.18 diperoleh Adjusted R Square sebesar 0.786. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah, penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan aktivitas pengendalian dapat menjelaskan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 78,6% perubahan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan sisanya 21,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak teramati dalam model penelitian ini.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4. aktivitas pengendalian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### Saran

Penelitian ini memiliki beberapa saran : 1. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pihak-pihak lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik. 2. Regulasi/Pemerintah, Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah 3. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan atas pertimbangan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintahan Kabupaten Kampar. 4. Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

Aliyah, Siti dan Aida Nahar, 2012, *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan*

*Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah vmmnnngKabupaten Jepara, Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 8/No. m2/Mei 2012: 97-189*

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi, 2007, *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat

Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta

Mulyana, Budi, 2006, *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol.2 No. 1, Mei 2006.*

Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Sande, Peggy, 2013, *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)*, Artikel Ilmiah Akuntansi. Universitas Negeri Padang

Saputra, Iskandar, 2014, *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian*

- terhadap *Akuntabilitas Keuangan* SKPD pada *Pemerintahan Kabupaten Bintan*. Jurnal Ilmiah Akuntansi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang
- Sari, Diana, 2012. *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Jurnal Akuntansi, Seminar Nasional Akuntansi & Bisnis, Bandung
- Sugiyono, 2009, *Statistika Penelitian*, BPF, Yogyakarta
- Sukhemi, 2013, *Pengaruh Aksesibilitas dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah*, Artikel Ilmiah Universitas PGRI Yogyakarta
- Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hubungan Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern Dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan: Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebagai Variabel Intervening (Penelitian Pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Kabupaten /Kota Wilayah Provinsi Jawa Barat)*. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh.
- Wiyana, Anim dan Anna Sutrisna, 2014, *Determinan Aksesibilitas Dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan*, Syariah Paper Accounting FEB UMS
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Laporan Realisasi Anggaran*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*

Pernyataan Standar Akuntansi  
Pemerintahan 01 tentang  
*Penyajian Laporan  
Keuangan*

Undang-undang Nomor 15 tahun  
2004 tentang *Pemeriksaan  
Pengelolaan Dan Tanggung  
Jawab Keuangan Negara*

Undang-undang Nomor 32 dan 33  
Tahun 2004, tentang  
*Keuangan Daerah*

<http://www.bpkriau.go.id>., *Laporan  
Hasil Pemeriksaan (LHP)  
oleh Badan Pemeriksa  
Keuangan Republik  
Indonesia (BPK RI)  
Kabupaten Kampar*